SALINAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
SEKRETARIAT UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memberikan layanan kepada pengguna dan penyediaan data atau informasi serta materi pelayanan lainnya secara cepat, tepat, dan akurat sesuai standar pelayanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, perlu membentuk Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1458);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pelayanan Fungsional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SEKRETARIAT UNIT PELAYANAN PUBLIK DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022, yang selanjutnya dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator ini disebut Sekretariat Yanlik dan SP4N-LAPOR!

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

KEDUA : Susunan keanggotaan Sekretariat Yanlik dan SP4N-LAPOR! terdiri atas:

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Ketua	:	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat.
Sekretaris	:	Gan Gan Muhamad Rizal, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media.
Anggota	:	1. Nining Sumianingsih, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat; 2. Faqih Mujahid, Kepala Subbagian Dukungan Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; 3. Diana, Kepala Subbagian Pelaporan, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 4. Witry Khanianingrum, Kepala Subbagian Dukungan Administrasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; 5. Subiyanto, Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum; 6. Sumadi, Pranata Humas Ahli Muda, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

7. Feri Juwanto, Pranata Humas Ahli Muda, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
8. Ika Sulistiowati, Arsiparis Ahli Muda, Biro Umum;
9. Fiantika Adhiarini, Arsiparis Ahli Muda, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Purwanto, Analis Tata Usaha, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
11. Febri Arianti, Analis Pelayanan, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;
12. Bianca Harum Pertiwi, Pranata Humas Ahli Pertama, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
13. Alija Berlian Fani, Pranata Humas Ahli Pertama, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
14. Dian Pratiwi, Pengadministrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
15. Nona Novita Taroreh, Pengelola Persidangan, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
16. Moh. Rizki Alfajri, Pengelola Data, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

17. Yulianti Safitri, Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
18. Achmad Faizal, Pengelola Dokumentasi, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat;
19. Alphania Debora Lastiur Marmora, Pengelola Sarana Prasarana Kantor, Biro Umum;
20. Masrida Utami, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat; dan
21. Nina Suwartika, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Sekretariat Yanlik dan SP4N-LAPOR! mempunyai tugas:

a. memberikan pelayanan administrasi pada Unit Pelayanan Publik; dan
b. melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR!

KEEMPAT : Sekretariat Yanlik dan SP4N-LAPOR! melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

KELIMA : Sekretariat Yanlik dan SP4N-LAPOR! bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Yanlik dan SP4N-LAPOR! dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 dan berlaku surut mulai tanggal 3 Januari 2022.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MULYO AJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat

Sidiq Mustofa

© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat